

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)  
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
NO.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum**  
**Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
Oleh :  
**ADRIANA**  
**NIM : 10400114260**  
MAKASSAR

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adriana  
NIM : 10400114260  
Tempat /Tanggal Lahir : Jeneponto, 15 Januari 1997  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum  
Alamat :Jl. Teduh Bersinar, Komp. Griya Fajar Mas Blok  
A/3  
Judul : Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)  
Terhadap Eksekusi Putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 23 Juli 2018

Penyusun,

**Adriana**  
NIM : 10400114260

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Adriana**, NIM : 10400114260, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Perlawanan Pihak Ketiga *Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 31 Mei 2018

Pembimbing I

Dr. Marilang, S.H., M.Hum  
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing II

Erlina, S.H., M.H  
NIP. 197303202005011005

Penguji I

Rahman Syamsuddin, S.H., M.H  
NIP. 19821207 200901 1 010

Penguji II

St. Nurlannah, S.H., M.H  
NIP. 19760822 200312 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Isiqamah, S.H., M.H  
NIP. 19680120 199503 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo " yang disusun oleh Adriana, NIM: 10400114260, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 M, bertepatan dengan 4 Dzul-Qa'idah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 23 Juli 2018 M.  
10 Dzul-Qa'idah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	:	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	:	Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	:	St. Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Marilang, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing II	:	Erlina, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo” sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam tak lupa penulis limpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, beliau sebagai tokoh yang pertama mengangkat derajat kaum wanita, sosok yang menumpas kekolotan umat manusia pada zaman kejahiliyaan dengan berpedoman pada Firman-Nya yang memerintahkan untuk membaca (Q.S. Al-Alaq ayat 5) sehingga umat manusia mampu berpendidikan dan mengubah hidup kearah yang lebih baik.

Dalam pencapaian yang luar biasa ini, penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibunda Istiqamah, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;

4. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
5. Bapak Dr. Marilang, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I penulis yang tiada henti memberikan masukan dan saran serta kritik terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat;
6. Ibunda Erlina, S.H., M.H, selaku pembimbing II penulis yang juga tiada henti memberikan masukan dan saran serta kritik terhadap metode penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan cepat;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
8. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Teman-teman angkatan 2014, yang sedikit banyak telah memberikan ide dan masukan kepada penulis;
10. Teman-teman KKN angkatan 57, terkhusus untuk posko Bontomate'ne
11. Teman-teman setia penulis, Andini Ika Aprilla, Ilmi Soraya Velika, Wirapati Meylinda, Utari Anggraeni, Intan Gustina Sari, Akbar Dwi Nugrah Fakhshir, Yudha Pradifta, Wawan Setiawan, Andi Rifda, Nurmagfirah Mutmainna, Syahra Rugaya Hamsah, yang selama ini sedikit banyak telah membantu memberikan motivasi, ide dan kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan penulis, Umayah Dwiyana, Ulfah Damayanti, Eno Anggraeni Rasyid, Nur Asiah, Kurni Ali Syarief, Rhara Ekawaty

Rahman, Indah Utami Syarifaini, dan Ummu Qalsum yang juga turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini;

13. Kak Vera dari Pengadilan Negeri Jeneponto, yang membantu penulis memperoleh data selama penyelesaian skripsi ini;

14. Kak Jumiati Alim S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tentunya menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang singkat, juga banyak memberikan pikiran-pikiran serta kritik yang membangun selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

15. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Amirullah dan Ibunda Hj. Gilly, yang telah merawat dan membimbing penulis sejak kecil hingga saat ini. Untuk saudara-saudari penulis, Kak Adnan, Kak Pai, Kak Ani Simba, terima kasih atas motivasi yang tiada henti serta berbagi pengalaman, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Semoga jasa-jasa beliau yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Samata, 30 Juli 2018

Penulis

**Adriana**  
**NIM : 10400114260**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A. Derden Verzet .....	15
B. Putusan Pengadilan Negeri .....	18
C. Eksekusi .....	23
D. Macam-macam Eksekusi .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Instrumen Penelitian .....	38



F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jenepono .....	39
B. Putusan Pengadilan Negeri Jenepono No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	



## ABSTRAK

**Nama : Adriana**

**Nim : 10400114260**

**Judul : Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi  
Putusan No. 08/Pdt.G/2017/Pn.Jo**

---

Skripsi ini merupakan kajian tentang proses penyelesaian perkara perdata *derden verzet* atau disebut sebagai perlawanan pihak ketiga yang terjadi di kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang pada dasarnya pihak ketiga keberatan terhadap penetapan eksekusi tanah karena pihak ketiga merasa hak-hak nya sebagai pemilik sah atas tanah telah dilanggar. Oleh karenanya, pihak ketiga dapat melakukan perlawanan dengan menguatkan bukti bahwa objek sengketa adalah milik pihak ketiga atau disebut sebagai pelawan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui proses serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata *derden verzet* yang terjadi di kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Adapun metode yang digunakan yakni interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara putusan mengenai *derden verzet* yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, serta mengumpulkan data perkara yang disidangkan dalam kurun waktu 5 tahun.

Selain itu, penulis juga menggunakan kajian kepustakaan dalam proses pengumpulan data yang terkait tentang perkara *derden verzet* yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa perkara *derden verzet* yang diajukan oleh pihak pelawan mengandung cacat formil, dimana syarat formil nya tidak terpenuhi, lebih tepatnya objeknya tidak jelas atau obscure sehingga gugatan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hukum di Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: hukum publik dan hukum privat tetapi di Indonesia lebih dikenal dengan dengan “Hukum Perdata”. Dalam perkara perdata, inisiatif terutama diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum, maka negaralah yang mengambil inisiatif.<sup>1</sup> Istilah hukum perdata berasal dari dua kata yaitu : “Hukum” dan “Perdata”. Kata hukum diambil dari bahasa arab dari kata *Hukm* (tunggal), *Ahkam* (jamak) yang artinya norma atau kaedah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>2</sup>

**Van Apeldoorn**, mengemukakan Tujuan hukum tidak lain adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>3</sup>

**HFA Vollmar** berpendapat bahwa hukum perdata adalah aturan – aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti : 2000), h.74

<sup>2</sup> Istiqomah, *Hukum perdata hukum orang dan keluarga*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h.1

<sup>3</sup> Chainur Arrasajid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2001), h. 40

perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Adanya berbagai kepentingan tiap warga masyarakat yang bersifat pribadi, ditambah dengan sifat dasar manusia yang cenderung selalu berusaha untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pribadinya inilah yang kemudian menjadi dasar perlu adanya suatu proses peradilan yang dapat memecahkan persoalan atau sengketa terkait hak kebendaan subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya. Proses peradilan yang dimaksud adalah proses peradilan perdata. Dalam suatu proses peradilan perdata tentu saja yang diterapkan atau berkaitan dengan hukum acara perdata.

**R. Soeroso** berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan-kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, kadang-kadang antara anggota masyarakat dengan pemerintah dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) macam perkara, yaitu perkara perdata permohonan (gugatan *voluntair*), dan perkara perdata gugatan (gugatan *contentiosa*). Perkara perdata permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang di ajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kasusnya yang di tunjukan kepada Ketua Pengadilan

---

<sup>4</sup> Istiqomah, *Hukum perdata hukum orang dan keluarga*, h.4

Negeri<sup>5</sup>. Perkara permohonan atau gugatan *voluntair* hanya dapat diajukan apabila masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Sedangkan perkara perdata gugatan atau gugatan *contentiosa* adalah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih (*between contending parties*);

Pada pokoknya proses peradilan dalam perkara permohonan (*voluntair*) dan perkara gugatan (*contentiosa*) hampir sama, yang membedakan hanyalah dalam proses peradilan perkara perdata permohonan (*voluntair*), oleh karena tidak adanya pihak yang dilawan sehingga tentu saja proses jawab menjawab diantara para pihak (misalnya Jawaban, Replik, Duplik) menjadi tidak ada. Hal tersebut berbeda dengan proses peradilan perkara perdata gugatan (*contentiosa*) yang mengenal adanya proses jawab menjawab diantara para pihak (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik).

Dalam proses peradilan perkara perdata gugatan (*contentiosa*), ada beberapa tahap yang harus ditempuh yaitu:

1. Tahap pendaftaran perkara:
  - a. Pengajuan Surat Gugatan. Surat Gugatan dapat diajukan langsung oleh Penggugat dan/atau Kuasanya, dan diajukan pada Pengadilan Negeri

---

<sup>5</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, (Jakarta: Mahkamah agung RI: 1994), h.110

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili Tergugat (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg);

- b. Membayar panjar biaya perkara. Pembayaran Panjar Biaya Perkara dilakukan oleh Penggugat dan/atau Kuasanya kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tempat ia mendaftarkan gugatannya, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan jarak (radius) tempat tinggal/domisili para pihak. Perhitungan Panjar Biaya Perkara dilakukan oleh Petugas Meja I pada Kepaniteraan Perdata;
- c. Pendaftaran Nomor Perkara Dalam Register Perkara. Setelah Penggugat dan/atau Kuasanya melakukan pembayaran Panjar Biaya Perkara, kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tempat ia mendaftarkan gugatannya, selanjutnya Gugatan Penggugat didaftar dan dicatat dalam buku Register Perkara Perdata Gugatan dan diberi Nomor Perkara;
- d. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan menangani perkara. Setelah perkara didaftarkan dan diberi nomor perkara, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut;
- e. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita. Setelah ditetapkan Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita yang akan menangani perkara tersebut

- f. Penetapan Hari Sidang. Penetapan Hari Sidang ditentukan oleh Hakim Ketua Majelis yang telah ditunjuk untuk menangani perkara tersebut;
- g. Pemanggilan Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat). Setelah Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang perkara tersebut, maka Jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut.

2. Tahap pemeriksaan perkara (persidangan);

- a. Memeriksa identitas para pihak. Pada proses persidangan, setelah para pihak yang berperkara hadir dalam sidang, maka Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali terhadap perkara perceraian sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan agar para pihak yang berperkara memasuki ruang sidang, lalu dilakukan pemeriksaan identitas para pihak;
- b. Mediasi. Sesuai ketentuan Perma 1 tahun 2016, maka setiap proses peradilan perkara perdata gugatan harus terlebih dahulu menempuh upaya mediasi, yaitu melakukan upaya perdamaian dengan bantuan dari Mediator. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perdata gugatan sifatnya adalah wajib. Akibat hukum terhadap putusan perkara yang tidak melalui proses mediasi adalah batal demi hukum. Apabila dalam proses mediasi



berhasil, maka Mediator membuat perjanjian perdamaian. Perjanjian Perdamaian ini dapat dikuatkan oleh Pengadilan Negeri menjadi Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), atas permintaan para pihak. Terhadap perjanjian menjadi Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) ini memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya Putusan. Sebaliknya, apabila proses mediasi gagal mencapai perdamaian maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

- c. Pembacaan surat gugatan penggugat. Apabila proses mediasi gagal mencapai perdamaian maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.
- d. Jawaban atas surat gugatan oleh Tergugat. Setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan Jawaban atas Surat Gugatan tersebut;
- e. Replik. Atas Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, Penggugat memiliki hak untuk menangkis Jawaban pihak Tergugat dengan mengajukan Replik.
- f. Duplik. Atas Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat memiliki hak untuk menangkis Replik pihak Penggugat dengan mengajukan Duplik;
- g. Pembuktian. Setelah proses jawab menjawab diantara para pihak selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam proses pembuktian ini ada 3 (tiga) tahap, yang pertama adalah pemeriksaan

bukti surat dari para pihak, yang kedua adalah pemeriksaan saksi-saksi dari para pihak, dan selanjutnya adalah Pemeriksaan Setempat (Pemeriksaan objek sengketa).

- h. Kesimpulan oleh para pihak. Setelah proses pembuktian, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan. Kesimpulan ini tidak wajib, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak boleh tidak mengajukan kesimpulan.
  - i. Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan untuk membahas Putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang ditangani tersebut. Musyawarah Majelis Hakim bersifat wajib.
  - j. Pembacaan Putusan. Pembacaan Putusan dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
3. Tahap pelaksanaan Putusan;
- Putusan dalam Perkara Perdata dapat dilaksanakan secara sukarela oleh oleh pihak terhukum, namun apabila pelaksanaan putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus agar Putusan tersebut dilaksanakan.

Dalam suatu peradilan perdata yang merupakan penerapan ketentuan dalam hukum acara perdata, terdapat bagian yang seringkali menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak selamanya diterima untuk

dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum. Sering terjadi pihak terhukum menghambat pelaksanaan putusan melalui apa yang disebut dengan *party verzet*, yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Sebagai contoh perlawanan diajukan oleh pihak debitur untuk melumpuhkan dan menunda eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau hipotik dengan dalil pokok yang dijadikan alasan adalah keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.

Selain perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam menghambat dan membatalkan eksekusi dapat dilakukan pula dengan memakai upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga). Perbedaan antara kedua cara perlawanan terhadap eksekusi tersebut, adalah terletak pada subjek atau pihak yang mengajukan perlawanan. Pada *party verzet* perlawanan diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, sedangkan pada *derden verzet* perlawanan diajukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara.

Walaupun pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUH Perdata), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang disebut sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) (vide Pasal 378 Rv). Ada dua jenis perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yaitu perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan perlawanan terhadap eksekusi.

*Derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa<sup>6</sup>. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (*conservatoir beslaag*) ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa sebelum putusan tersebut (Pasal 379 Rv)<sup>7</sup>.

*Derden verzet* atas eksekusi dapat diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan tetap dan sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila eksekusi telah dilaksanakan maka perlawanan terhadap eksekusi tidak dapat lagi dilakukan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan. *Derden verzet* terhadap eksekusi dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut. Yang menjadi objek perlawanan dalam perlawanan *derden verzet* adalah penetapan eksekusi, oleh karenanya *derden verzet* hanya dapat diajukan apabila telah ada penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara asal pada tingkat pertama. Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan berdasarkan dalil bahwa barang yang akan dieksekusi tersebut adalah hak milik dari Pelawan.

Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg menentukan:

---

<sup>6</sup>M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h. 300.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke Tujuh*. (Yogyakarta: Liberty: 2006). h.245

*“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”<sup>8</sup>*

Berdasarkan ketentuan tentang *derden verzet* tersebut secara tegas menentukan bahwa, perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.

Pelawan sebagai pemilik dari objek sengketa yang di sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar bisa mendapatkan kembali haknya dan pelaksanaan sita eksekusi diangkat.

Pada dasarnya *derden verzet* dapat dilakukan karena pihak ketiga yang memiliki hak terhadap tanah yang menjadi sengketa antara pihak terlawan dan pemohon eksekusi yang pada saat itu pihak ketiga bukan bagian dari pihak-pihak yang berperkara dan karena merasa hak-haknya telah dilanggar dan permohonan eksekusi tersebut.

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)h. 14

Membahas mengenai pertimbangan hukum dalam perkara yang penulis hendak angkat yaitu bagaimana hakim dalam menyikapi setiap perkara perdata baik berkenaan *derden verzet* atau yang bersifat umum yaitu apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah surat gugatan.

Selain pertimbangan hukum hakim dalam melihat terpenuhinya syarat formil dan materil dari sebuah gugatan, penulis juga ingin mengkaji lebih detail berkaitan dengan amar putusan hakim, bagaimana hakim dalam menentukan amar putusan, dengan pertimbangan-pertimbangan, duduk perkara dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dalam prakteknya, hampir setiap eksekusi yang akan dilaksanakan, dilakukan dengan perlawanan/bantahan sehingga melumpuhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi. Salah satu contoh pengajuan perlawanan yang mengakibatkan pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda adalah kasus yang akan penulis uraikan dalam penulisan ini, yaitu Putusan pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor Perkara: 08/Pdt/G/2017/Pn.Jnp

Dengan maraknya terjadi kasus permasalahan tersebut, Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi ini dengan tujuan agar dapat mengetahui apa saja syarat pengajuan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi, selain itu dalam penelitian ini juga akan dibahas tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap eksekusi yang

diajukan oleh pihak ketiga, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, khususnya dalam Putusan Perkara No.08/Pdt.G/2017/PN Jnp.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah Tinjauan Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet* Eksekusi) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto (Studi Kasus Putusan No.08/Pdt/G/2017/Pn.Jo).

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran-an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

#### **2. *Derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)**

*Derden verzet* adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau dalam penetapan yang dilawan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M.Yahya Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) h.23



Perlawanan menurut **Retnowulan** adalah upaya hukum biasa untuk melawan putusan *Verstek*, banding dan kasasi.<sup>10</sup> Pada dasarnya, upaya hukum ini menurut Retnowulan menanggukuhkan eksekusi, terkecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menggunakan istilah *Verzet* untuk perlawanan yang merupakan upaya hukum biasa yang diajukan untuk melawan putusan *Verstek*.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “*derden verzet*”<sup>11</sup> apabila yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga. Istilah *derden verzet* atau “*verzet door derden*” juga digunakan oleh Retnowulan untuk perlawanan pihak ketiga sebagai upaya hukum luar biasa.<sup>12</sup>

### 3. Eksekusi

Eksekusi (*executie*) ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eksekusi ialah 1. Pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk hukuman mati; 2. Pelaksanaan keputusan

---

<sup>10</sup>Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek* (Bandung:CV.Mandar Maju:1995) h.142

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. (Yogyakarta:Liberty:2016) h.196

<sup>12</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, h. 144

<sup>13</sup>Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi. Praktek Kejaksaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tata Nusa:2004), h. 60

pengadilan untuk menyita atau menjual harta orang yang tidak dapat membayar utangnya (dengan perjanjian)<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jeneponto atas putusannya No.08/pdt/G/2017/PN.Jo?
3. Bagaimanakah amar putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannya No. 08/pdt/G/2017/PN.Jo?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak akan keluar dari permasalahan yang diangkat oleh penyusun, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jeneponto atas putusannya No.08/pdt/G/2017/PN.Jo
3. Untuk mengetahui amar putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannya No. 08/pdt/G/2017/PN.Jo

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia,Cet.1*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,2003), h.77

1. Secara akademisi, penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya dibidang Ilmu Hukum, karena penelitian ini menjelaskan tentang *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga, membahas berkaitan dengan acara perdata prosedur serta prosesnya dalam pengajuan perlawanan pihak ketiga.
2. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan juga bisa berguna dan memberikan sumbangsi bagi para penegak hukum, dalam menentukan dan mempertimbangkan dalam memberikan atau menjatuhkan suatu putusan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Derden verzet*

##### 1. Pengertian *Derden verzet*

*Derden verzet* adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau dalam penetapan yang dilawan.<sup>1</sup>

*Derden verzet* merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.<sup>2</sup>

Perlawanan menurut Retnowulan adalah upaya hukum biasa untuk melawan putusan *Verstek*, banding dan kasasi.<sup>3</sup> Pada dasarnya, upaya hukum ini menurut Retnowulan menangguhkan eksekusi, terkecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) h.23

<sup>2</sup> R. Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung, hal. 171-172.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek* (Bandung:CV.Mandar Maju:1995) h.142

terlebih dahulu. **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menggunakan istilah *Verzet* untuk perlawanan yang merupakan upaya hukum biasa yang diajukan untuk melawan putusan *Verstek*.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “*derden verzet*”<sup>4</sup> apabila yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga. Istilah *derden verzet* atau “*verzet door derden*” juga digunakan oleh Retnowulan untuk perlawanan pihak ketiga sebagai upaya hukum luar biasa.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum mengajukan *Derden verzet*

Pasal 206 R.Bg./195 H.I.R: Ayat (6) “ Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”; Ayat (7) R.Bg.” Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan Negeri itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu”; Ayat (7) H.I.R. “Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali *Derden verzet* hlm. 3 dari 10 hlm. dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memeriksa perkara itu”

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. (Yogyakarta:Liberty:2016) h.196

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, h. 144

Pasal 378 Rv: “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”;

Pasal 379 Rv: “Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

Pasal 382 Rv: “Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”;

### **3. Alasan-alasan hukum diajukannya *Derden verzet***

Pada umumnya gugatan *derden verzet* diajukan oleh Pihak ketiga dalam rangka menghambat atau mengulur-ulur waktu tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) ini berbagai macam cara dan alasan tergugat/tereksekusi dengan meminta bantuan pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan agar terhindar dari eksekusi bahkan adapula perlawanan eksekusi itu dari pihak tereksekusi sendiri, ada pula dengan cara tereksekusi dengan sengaja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

## ***B. Putusan Pengadilan Negeri***

### **1. Pengertian Putusan**

Menurut **Leden Marpaung**, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis Hakim untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Akan tetapi perlu dijelaskan bahwa putusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan pada peradilan tingkat pertama. Dan memang

---

<sup>6</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana (Dalam Integrasi Keilmuan)*, (Alauddin University Press : Makassar : 2013), hal. 209



tujuan akhir pemeriksaan perkara di PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim atau biasa disebut putusan majelis adalah suatu ketetapan hakim berdasarkan hasil musyawarah yang dijatuhkan atas suatu perkara, dimana dalam putusan tersebut memuat hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang berperkara, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## 2. Syarat-syarat Putusan

Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR [9], Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. Menurut ketentuan undang undang ini, setiap putusan harus memuat hal – hal sebagai berikut :

### a. Kepala Putusan

Suatu putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14 / 1970 kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut

### b. Identitas pihak yang berperkara

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, ( Cet. 15 : Sinar Grafika : Jakarta : 2015), hal. 797.

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain.

c. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.

Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

Putusan yang kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan, MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K / SIP / 1969; MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 / K / SIP / 1970. Putusan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan MA tanggal 01 September 1971 No 372 K / SIP / 1970

d. Amar atau diktum putusan

Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu

ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

e. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) H.I.R dan pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

### 3. Formalitas Putusan

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sedikitnya ada 10 (sepuluh) buah elemen yang harus terpenuhi. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila kesepuluh elemen itu tidak terpenuhi (kecuali yang tersebut pada huruf g dan i), maka putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

---

<sup>8</sup> <http://coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2018 pukul 00.47

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

### C. Eksekusi

#### 1. Pengertian eksekusi

Eksekusi (executie) ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eksekusi ialah 1. Pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk hukuman mati; 2. Pelaksanaan keputusan pengadilan untuk menyita atau menjual harta orang yang tidak dapat membayar utangnya (dengan perjanjian).<sup>10</sup>

Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>11</sup>

#### 2. Asas-asas eksekusi

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu

<sup>9</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi. Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tata Nusa:2004), h. 60

<sup>10</sup> J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), h. 77

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana:2016 ),h. 145

perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak

tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela. Pengecualian terhadap asas ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang adalah :

1) Pelaksanaan Putusan lebih dahulu. Menurut Pasal 180, ayat (1)

HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa :



- a) Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b) Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.
- c) Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
- d) Sengketa yang ada sekarang mengenai bezitsrecht.

b. Pelaksanaan putusan lebih dahulu

Menurut pasal 180 ,ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini member hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu ,sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

c. Pelaksanaan putusan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

d. Akta Perdamaian.

Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

e. Eksekusi terhadap Grosse Akta.

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

2) Putusan Tidak dijalankan secara Sukarela. Dua cara menjalankan isi putusan, yaitu :

- a. Secara sukarela Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

- b. Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.
- c. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

- d. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator
- Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel).

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

- 1) Putusan *Condemnator*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”;
- 2) Putusan *Declarator*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan
- 3) Putusan yang Konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Putusan yang bersifat kondemnator biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk *Contentiosa* (kontentiosa) dengan ciri-ciri : Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan Proses pemeriksaannya berlangsung secara *Contradictoir*, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.

Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan

yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.<sup>12</sup>

### **3. Eksekusi yang dapat dilawan oleh pihak ketiga**

Diketahui bahwa pada dasarnya, pelembagaan perlawanan sebagai upaya hukum dalam proses peradilan, bertujuan untuk:<sup>13</sup>

#### **1. Melawan Penyitaan:**

- a. Sita jaminan;
- b. Sita eksekusi;
- c. Sita marital;

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, h.27

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata, Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 24

## 2. Melawan eksekusi

- a. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Grose Akta (Hipotik, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia);
- c. Melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR.

Menurut pasal 195 ayat (6) HIR, ada dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Hal itu dapat dilihat dari kalimat “jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal tersebut perlawanan terdiri atas perlawanan terhadap putusan atau penetapan yang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau penetapan yang disebut pula partai verzet (PV) dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam proses putusan atau penetapan yang dilawan atau disebut juga *derden verzet* (DV). Didalam Rv, Rv tidak menyinggung mengenai PV. Pasal 378 Rv juga tidak menyinggung masalah PV, Pasal tersebut hanya menyebutkan DV.

Akan tetapi, meskipun Rv tidak menyinggung PV, bukan berarti PV tidak diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan. Pengakuan eksistensinya oleh HIR sudah cukup menjadi landasan

---

<sup>14</sup> Pasal 195 ayat (6) HIR

keabsahannya. Dalam hal ini HIR dan Rv saling melengkapi demi kepentingan ketertiban beracara.<sup>15</sup>

Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwa alasan mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga adanya “hak milik” pihak lain yang disita. Pengertian milik menurut hukum bersifat hak absolut. Jika dilihat dari sudut pandang pasal 570 KUHPdata hak milik memiliki asas *drit de suite*. Dengan demikian, berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR dan dihubungkan dengan ketentuan KUHPdata maka hanya hak kebendaan absolute (Hak milik) dapat dijadikan landasan atau alasan mengajukan perlawanan. Hak-hak yang lain, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak pakai misalnya, tidak dapat dijadikan alasan perlawanan.

Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pihak lain yang HGBnya disita oleh pengadilan. Pihak lain tersebut tidak dapat mengajukan DV, karena alasan sita terhadap HGB tidak dapat dijadikan landasan untuk mengajukan DV, alasan perlawanan tidak memenuhi persyaratan karena bukan hak milik.

Alasan perlawanan menurut HIR tersebut berbeda dengan alasan yang diatur oleh ketentuan pasal 378 Rv dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan berupa DV untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan hak tersebut. kepentingan atau hak yang dirugikan

---

<sup>15</sup>M.Yahya Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, h.36

putusan yang dilawan, tidak harus menyangkut dan berkaitan dengan benda berwujud berupa hak milik<sup>16</sup>

#### ***D. Macam-Macam Eksekusi***

##### **1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana Seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.**

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

---

<sup>16</sup>M.Yahya Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, h.48



## **2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR**

Dimana Seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu.

Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak didalam sidang terbuka.

## **3. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR**

Perihal ini tidak diatur dalam HIR pasal 200 ayat(11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi riil.

“ Jika perlu dengan pertolongan Polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta olah sanak saudaranya.”

Pasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh jurusita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota Polisi Militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu anggota ABRI misalnya.

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktek sangat diperlukan<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, h. 122-123

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukm atau badan pemerintah.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto khususnya di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu perlawanan pihak ketiga (*derden verzet* eksekusi) studi kasus putusan No.08/pdt/G/2017/PN JO. Penulis mengambil wilayah Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Negeri Jeneponto merupakan pengadilan dengan jumlah perkara *derden verzet* relatif banyak dibanding pengadilan lain di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang lain,dst.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isi hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data,yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh data yang diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini hakim yang bersangkutan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian penulis dan dari sumber-sumber pendukung lainnya yang telah ditentukan.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Untuk data primer pengumpulan datanya adalah wawancara kepada informan yang telah ditentukan.
2. Untuk data sekunder pengumpulan datanya adalah penyusunan dokumen atau buku yang relevan dengan penelitian ini.

#### ***E. Instrument Penelitian***

Instrument penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *tape recorder*,
2. buku,
3. kamera
4. serta peneliti itu sendiri

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis***

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berangkat dari data

lapangan dan disajikan serta deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah digunakan.

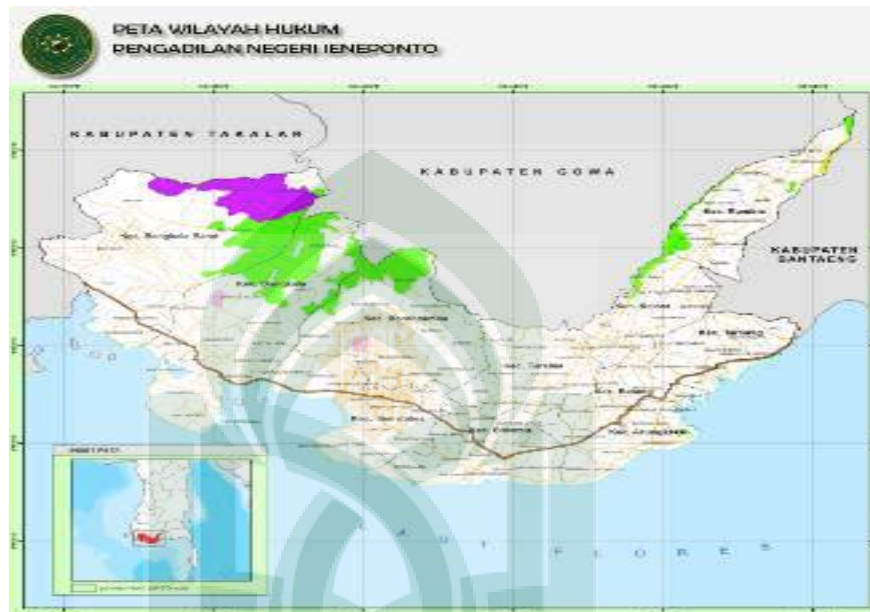


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jeneponto

##### 1. Peta Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Negeri Jeneponto



##### a. Lambang Daerah

Daerah Kabupaten Jeneponto yang menggambarkan unsur-unsur historis, kultur, patriotik, sosialogis, dan ekonomi yang keseluruhanya merupakan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari NKRI. Terdiri atas lima bagian yang berbeda, yakni pohon lontar dan batang aksara berbentuk (T), kuda putih, globe tiga warna bersusun, daun lontar model pita yang bertuliskan Jeneponto dan model perisai.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Website, Pengadilan Negeri Jeneponto <http://www.pn-jeneponto.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-jeneponto/wilayah-hukum/peta-yurisdiksi> Diterbitkan: Senin, 17 Februari 2014 11:01 (Diakses Hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018)

b. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jeneponto

Secara geografis daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 desa/kelurahan) lembah, 27% (30 desa/kelurahan) lereng/bukit dan 40,17% (45 desa) adalah dataran.

Kabupaten Jeneponto terletak pada lengan selatan bagian selatan Pulau Sulawesi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

Letak geografis kabupaten Jeneponto berada antara 5°23'12"-5°42'1,2" Lintang Selatan dan 119°29'12"-119°56'44,9" Bujur Timur dengan Batas Wilayah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Selatan : Berbatasan Laut Flores

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Jeneponto pada awalnya hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, namun kemudian dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan Kelara satu-satunya kecamatan yang tidak mengalami pemekaran. Dengan pemekaran tersebut maka terjadi pula pembagian desa/kelurahan



## c. Data Statistik Perkara Di Pengadilan Negeri Jeneponto

**Table 1**  
**Jumlah Perkara Yang Di Adili Di Pengadilan Negeri**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Pidana	Perdata
1.	2013	126	P=15/C=8
2.	2014	117	P=15/C=28
3.	2015	75	P=27/C=10
4.	2016	90	P=24/C=5
5.	2017	77	P=27/C=3
<b>Jumlah</b>		<b>485</b>	<b>155</b>
<b>Keterangan</b>		P= Putus, C= Cabut	

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Jeneponto, *Laporan Tahunan Untuk Bulan Januari Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.***

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kasus yang paling banyak di sidangkan dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Jeneponto adalah kasus pidana, dengan jumlah 485 kasus, dibandingkan kasus perdata yang telah diputuskan atau dicabut sebanyak 152 kasus. Dari jumlah 485 kasus pidana, semuanya terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu pidana khusus, pidana cepat, ringan, serta lalu lintas. Adapun perkara perdata juga terbagi dalam kelompok gugatan, dan permohonan. Mengenai gugatan yang dicabut pada keterangan table diatas, gugatan dicabut

dengan beberapa alasan, diantaranya adalah gugatan yang diajukan tidak sempurna, dasar gugatan tidak berkekuatan hukum atau bertentangan dengan hukum, serta ada pula disebabkan karena telah menempuh jalur mediasi dan tidak dilanjutkan di persidangan.

**Table 2**  
**Jumlah perkara perdata yang telah putus dan belum putus**  
**oleh pengadilan negeri jeneponto**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Belum Putus	Telah Putus
1.	2013	15	23
2.	2014	13	33
3.	2015	11	37
4.	2016	8	29
5.	2017	18	30
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>152</b>
<b>Keterangan</b>			

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Jeneponto, Laporan Tahunan Untuk Bulan Januari Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.**

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa perkara gugatan perdata yang telah putus sejak tahun 2013-2017 sebanyak 152 kasus. Sedangkan yang belum putus sebanyak 65 kasus. Jumlah kasus yang belum putus di tiap tahunnya merupakan sisa gugatan yang belum putus dari bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kasus yang belum putus tersebut sedang dalam tahap penyelesaian.

**Table 3**  
**Jumlah perkara perdata yang belum di eksekusi dan telah di eksekusi**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Belum Di Eksekusi	Telah Di Eksekusi
1.	2013	11	6
2.	2014	14	4
3.	2015	14	4
4.	2016	19	2
5.	2017	26	-
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>16</b>
<b>Keterangan</b>			

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Jeneponto, *Laporan Tahunan Untuk Bulan Januari Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.***

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 84 kasus gugatan perkara perdata yang belum dieksekusi, dan sebanyak 16 kasus yang telah dieksekusi. Kasus yang belum dieksekusi merupakan sisa kasus yang eksekusinya belum dilaksanakan sejak bulan Januari s/d Desember tiap tahunnya, yaitu sejak tahun 2013-2017

**Table 4**  
**Perkara perdata yang di *Derden Verzet* dan Tidak Di *Derden Verzet***  
**Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Perkara Biasa	<i>Derden verzet</i>
1.	2013	22	1
2.	2014	42	1
3.	2015	28	2
4.	2016	29	-
5.	2017	29	1
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>5</b>
<b>Keterangan</b>			

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Jeneponto, *Laporan Tahunan Untuk Bulan Januari Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.***

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 s/d 2017, jumlah perkara yang *Derden verzet* sebanyak 5 perkara. Sedangkan kasus biasa sebanyak 140 perkara. Hal ini dikarenakan *derden verzet* merupakan kasus yang sangat jarang terjadi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jeneponto, mengingat bahwa *derden verzet* merupakan perlawanan, pihak ketiga terhadap penetapan eksekusi putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto. Artinya, pihak pelawan mengajukan perlawanan setelah keluarnya putusan terdahulu. Pada tahun 2017, 1 perkara *derden verzet* disidangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim

dikarenakan perlawanan diajukan oleh pihak pelawan sebelum ada penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, selain itu, dalam gugatan yang diajukan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil yaitu pelawan salah menggugat terlawan atau *error in persona*

**B. Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto no.08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp**

Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan.

Dalam hal ini, Pelawan telah melayangkan gugatan kepada Terlawan, terkait permohonan eksekusi tanah yang dimohonkan Terlawan pada sidang terdahulu dengan nomor perkara 26/PDT.G/2013/PN.JO, dimana pada sidang terdahulu, pelawan yang merupakan pemilik tanah tersebut berdasarkan sejumlah barang bukti dan saksi, merasa tidak pernah dilibatkan pada sidang terdahulu, sehingga pihak pelawan merasa hak-hak nya telah dirampas, dan meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menangguhkan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri jeneponto hingga putusan dalam perkara perlawanan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dimaksud pada perkara terdahulu nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO

## 1. Duduk Perkara

**SAHARIA**, berdasarkan identitas kependudukan, bertempat tinggal di Kampung Cengkong, Kel/Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Meidiyanto Santoso S.H, Amiruddin Lannurung S.H., M.H, Iryanti Wahyuningsih S.H, advokat dari kantor pengacara Dedi Meidiyanto Santoso S.H & Partner, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan.**, melawan:

**SAING DG NGERO**, Petani, berdasarkan identitas kependudukan bertempat tinggal di Kampung Bonto Baddo, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan.**

Bahwa pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa pada perkara terdahulu nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO berdasarkan SHM nomor 82 tahun 2009 yang kini telah dimohonkan eksekusi oleh terlawan. Akan tetapi, pada putusan terdahulu, pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara yang merupakan pemilik sah objek sengketa yang harus dilindungi hak-hak nya berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awalnya, pelawan tidak tahu mengenai perkara terdahulu yang sedang berjalan, nanti setelah terbit aanmaning (teguran) dari Pengadilan Negeri Jeneponto kepada termohon eksekusi untuk memenuhi amar putusan perkara terdahulu barulah pelawan menyadari bahwa tanah tersebut sedang dalam proses persidangan.

Diketahui bahwa objek sengketa adalah sah milik pelawan/SAHARIA bersama keluarganya dan yang lain termohon eksekusi (Paka Bin Dg. Haliman dkk) yang diperoleh melalui warisan orang tua/ ayah pelawan, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum antara tanah objek sengketa dengan pihak terlawan. Selanjutnya dalam perkara ini, pelawan telah menyerahkan buktii-bukti yang kuat (PLW 1- PLW 27), serta menghadirkan 5 orang saksi sebagai penguat bahwa tanah tersebut adalah sah milik pelawan.

Oleh karena pihak pelawan merasa hak-hak nya sebagai pemilik tanah objek sengketa telah dirampas oleh adanya putusan perkara terdahulu sehingga pelawan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya, menyatakan bahwa menurut hukum, pelawan adalah pelawan yang benar, berhak, dan pemilik sah terhadap objek sengketa, memohon kepada majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena merupakan tanah milik pelawan serta memerintahkan untuk menanggihkan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto hingga putusan dalam perkara perlawanan eksekusi ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi dalam perkara ini, ternyata pihak terlawan telah meninggal dunia 2 tahun sebelum pihak pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan, sehingga majelis hakim menimbang ebrdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1181/K/Pdt/2011, maka pihak pelawan tidak dapat lagi mengajukan kepada pihak terlawan, melainkan

harus ditujukan kepada ahli waris terlawan. Maka dari itu, majelis hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

## **2. Dasar Gugatan**

Putusan perkara nomor 26/PDT.G/2013/PN.JO

SEMA NO. 2 TAHUN 1964, SEMA NO. 3 TAHUN 1986 dan SEMA NO. 14 TAHUN 2009 serta beberapa SEMA lainnya, mengenai penundaan eksekusi

## **3. Pokok Perkara**

Karena merasa keberatan hak-hak nya sebagai pemilik objek tanah sengketa dirugikan, maka penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk kemudian memohon agar Majelis Hakim memutuskan menangguhkan eksekusi tanah objek sengketa karena objek sengketa adalah milik penggugat secara sah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) nomor 82 tahun 2009

## **4. Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 17 Februari 2017, tetapi Terlawan tidak juga hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya di persidangan maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan (*bij verstek*);



- c. Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terlawan tetapi tidak secara serta merta mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan akan tetapi hanya hal-hal yang beralasan hukum dan tidak melanggar hukum saja yang dikabulkan, dan untuk hal itu maka Pelawan harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;
- d. Menimbang, bahwa pokok Perlawanan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan adalah bahwa Pelawan merupakan pemilik sebagian tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 26/Pdt.G/2009/PN.JO jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/PDT/2010/PT.MKS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 118 K/Pdt/2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 435 K/Pdt/2015;
- e. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan melalui Kuasanya mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- f. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan melalui Kuasanya juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan yakni saksi Muddin, saksi Tega, saksi Jumanai, saksi Barri, saksi Suang yang telah memberikan keterangan setelah terlebih dahulu

diambil sumpahnya di muka persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

- g. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Pelawan, ternyata pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Saing Dg. Ngero, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kampung BontoBaddo, Desa Kapita, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- h. Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Terlawan pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya di persidangan Majelis Hakim memeriksa Risalah Panggilan (*relaas panggilan*) kepada Terlawan tertanggal 17 Februari 2017, ternyata dalam relaas panggilan tersebut Jurusita menerangkan bahwa ia tidak bertemu dengan Terlawan karena Terlawan telah meninggal dunia pada tahun 2012, kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada keluarga Terlawan;
- i. Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pelawan juga telah menyatakan kalau Terlawan telah meninggal dunia sekitar beberapa tahun sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, selanjutnya saksi Muddin, dan saksi Suang juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Terlawan telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun sebelum perkara perlawanan ini diajukan;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1181 K/PDT/2011**, dengan kaidah hukum: "*gugatan tidak*

*dapat diterima/niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab”*

- k. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena yang diajukan sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini yaitu Saing Dg. Ngero ternyata telah meninggal dunia, maka Pelawan tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang ditujukan langsung kepada Terlawan, melainkan haruslah ditujukan kepada ahli waris dari Terlawan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan tidak cermat dalam menyusun gugatan perlawanannya sehingga perlawanan ini mengandung cacat formil yakni perlawanan pelawan salah orang (*error in persona*);
- l. Menimbang, bahwa selain hal tersebut dipersidangan setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil perlawanan Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan atas perkara No. 26/PDT.G/2009/PN.JO., jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/PDT/2010/PT.MKS, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 118 K/PDT/2011, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 435 PK/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena tanah objek sengketa yang

dimohonkan eksekusi tersebut adalah tanah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomot 82 tahun 2009, yang mana pada perkara terdahulu Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak;

- m. Menimbang, bahwa dalam upaya perlawanan terhadap eksekusi maupun sita eksekusi, perlawanan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya terganggu (*derden verzet*), dengan demikian Pelawan memiliki hak untuk melakukan perlawanan dalam perkara ini;
- n. Menimbang, bahwa namun demikian terhadap upaya perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diajukan oleh Pelawan haruslah didasari dengan adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (*vide* Pasal 206 ayat (1) RBg), dan berdasarkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut barulah dapat diajukan perlawanan (*verzet*) oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya terganggu (*vide* Pasal 206 ayat (6) RBg);
- o. Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasanya di persidangan hanya menghadirkan bukti surat P-26 dan P-27 berupa Risalah Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (Paka bin Dennialiman, dkk), akan tetapi baik dalam posita perlawanannya, Pelawan tidak mencantumkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, dan pada proses pembuktian, Pelawan juga tidak menghadirkan bukti surat berupa Perintah/Penetapan Eksekusi oleh

Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan demikian Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi sebelum Perintah/Penetapan Eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

- p. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan belum dapat diajukan (*premature*);
- q. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan yang disampaikan oleh Pelawan ini tidak memenuhi syarat formil suatu perlawanan, sehingga terhadap perlawanan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- r. Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 RBg, Pelawan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;
- s. Memperhatikan ketentuan pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1181 K/PDT/2011, Pasal 206 ayat (1) RBg, Pasal 206 ayat (6) RBg, PERMA No. 1 tahun 2016, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

## 5. Pertimbangan Hukum Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, baik *derden verzet* maupun perkara biasa, yang paling pertama diperiksa oleh Majelis

Hakim adalah formalitas gugatan, dimana formalitas gugatan tersebut memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup identitas para pihak, selanjutnya syarat materilnya mencakup isi gugatan, apakah beralasan hukum atau tidak.

Selanjutnya, dalam mengajukan gugatan, hal yang harus diperhatikan adalah jangka waktu gugatan tersebut, apakah sudah daluarsa atau tidak, atau bahkan premature. Premature dalam hal ini berarti gugatan diajukan sebelum waktunya.

*Derden verzet* diajukan apabila telah ada perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pada perkara ini, perintah eksekusi belum dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, melainkan hanya mengirimkan surat teguran kepada pihak terlawan untuk menaati isi putusan, sehingga gugatan pelawan dalam perkara no.08/pdt.G/2017/Pn.Jo dianggap premature.

Apabila syarat formil telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah pokok perkara. Dalam perkara *derden verzet*, majelis hakim harus melihat keterangan saksi & bukti yang diajukan pelawan, serta memeriksa perkara terdahulu, apakah ada kekeliruan atau tidak.<sup>2</sup>

## 6. Amar Putusan

Dalam perkara nomor 08/Pdt.G/2010/Pn.Jnp, majelis hakim mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Jumiaty Alim, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, *Wawancara* pada tanggal 2 Mei 2018

1. Menyatakan terlawan yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 2.361.000 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## **7. Komentor Penulis**

Berdasarkan analisa putusan dan wawancara yang dilakukan penulis oleh Majelis Hakim yang memutus perkara diatas, penulis berpendapat bahwa dalam perkara no 08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp yang diangkat oleh penulis, pihak terlawan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan negeri Jenepono, tidak hadir di dalam persidangan, sehingga majelis hakim memutus perkara secara verstek karena ketidakhadiran terlawan. Selain itu, berkaitan dengan syarat materil dari gugatan tersebut, adapun keterkaitan dan hubungan hukumnya antara lain perlawanan yang disampaikan oleh kuasa hukum pelawan adalah bahwa pelawan merupakan pemilik sebagian tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri jenepono nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO jo. Putusan pengadilan tinggi Makassar nomor 181/Pdt/2010/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 118/K/Pdt/2011 jo. Putusan MA RI nomor 435K/Pdt/2015; yang dapat dibuktikan dengan mengajukan (27) bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah

sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Berkaitan dengan syarat formil dari gugatan yang diajukan, bahwa pelawan mengajukan gugatannya dengan pihak terlawan yang pada saat diajukan, pihak terlawan dalam hal ini saing dg ngero ternyata telah meninggal dunia. Jadi seharusnya pihak pelawan tidak lagi dapat mengajukan gugatannya terhadap terlawan, melainkan harus ditujukan kepada ahli waris dari terlawan, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1181K/Pdt/2011 dengan kaidah hukum: “gugatan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard*) karena penggugat atau menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan dan bukannya merupakan kewenangan dari pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung” dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat pelawan tidak cermat dalam menyusun gugatan perlawanannya sehingga perlawanan ini mengandung cacat formil yakni pelawan salah orang atau (*error in persona*).

Mengenai amar putusan, penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini, amar putusan dengan nomor 08/Pdt.Plw/2017/Pn/Jnp yaitu ketidakhadiran pihak terlawan sehingga menyebabkan dibacakannya putusan secara verstek, telah sesuai dengan peraturan yang ada karena berdasarkan duduk perkara bahwasanya pihak terlawan telah dipanggil



sesuai dengan standar dan ketentuan prosedur yang ada, yaitu dipanggil secara sah dan patut. Adapun sah dan patut adalah bahwa terlawan dipanggil oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan para pihak oleh pengadilan negeri bersangkutan, disampaikan atau diberikan di tempat tinggal terlawan tersebut. Selanjutnya, amar putusan lainnya adalah bahwasanya perlawanan yang diajukan pelawan tidak dapat diterima karena pada dasarnya perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diajukan pelawan haruslah didasari dengan adanya suatu perintah atau penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (vide Pasal 206 ayat (1) Rbg) dan berdasarkan perintah atau penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri tersebut barulah dapat diajukan perlawanan (*Verzet*) oleh pihak ketiga yang merasa hak-hak nya terganggu (vide Pasal 206 ayat (6) Rbg). Akan tetapi, pada saat itu perintah atau penetapan eksekusi belum dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri jeneponto, sehingga perlawanan ini dianggap premature. Selain dalam persidangan, pelawan hanya melalui kuasanya dipersidangan hanya menghadirkan bukti surat P-26 dan P-27 berupa risalah panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi (Paka Bin Dg. Naliman dkk).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan pihak ketiga mengajukan derden verzet dalam putusan karena pelawan sangat keberatan dengan dirugikan hak-haknya sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 82 tahun 2009, terhadap akan dilaksakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jeneponto. Selanjutnya Pelawan keberatan karena dirinya tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara pada perkara terdahulu
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil.
3. Amar putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 08/Pdt.G/2017/PnJo adalah sebagai berikut:
  - Menyatakan terlawan yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan
  - Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima dengan verstek
  - Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sebesar Rp. 2.631.000 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran berupa :

1. Dalam persidangan sebelumnya, pihak ketiga harus di libatkan karena pihak ketiga merupakan pemilik sah dari objek sengketa

2. Dalam mengajukan gugatan, pihak pelawan harus memperhatikan dengan teliti tentang subyek yang di lawan atau yang di gugat, agar tidak mengandung cacat hukum yang bisa membatalkan persidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Badudu, J.S. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia, Cet.1*. PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Harahap, M.Yahya. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I* . PT.Citra Aditya Bakti : Bandung
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata (Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta
- Istiqomah. 2014. *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*. Alauddin University Press : Makassar
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke Tujuh*. Liberty: Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. Liberty : Yogyakarta
- Subekti, R. 1997, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman : Bandung
- Susanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*. CV.Mandar Maju : Bandung
- Suyuthi, Wildan. 2004. *Sita Eksekusi. Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. PT. Tata Nusa : Jakarta
- Syamsuddin, Rahman. 2012. *Modul 1 Kepaniteraan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum : Makassar
- Syamsuddin, Rahman. 2013. *Hukum Acara Pidana (Dalam Integrasi Keilmuan)*, (Alauddin University Press : Makassar

### Peraturan Perundang-Undangan :

HIR

Vr

R.Bg

KUHPerdata

**Referensi Lain**

[http:// coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html](http://coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html), (23 Mei 2018)

<http://www.pn-jeneponto.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-jeneponto/wilayah-hukum/peta-yurisdiksi> (04 Mei 2018)



## **RIWAYAT HIDUP PENELTI**



**ADRIANA**, Lahir di Kabupaten Jeneponto, 15 Januari 1997, Sulawesi –Selatan, anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Amirullah, S.E, dan Ibu Hj. Gilly. Mengawali pendidikan di tingkat Dasar SD Inpres Bontosunggu no. 200 dan lulus pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama di SMP Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMA 1 Binamu Kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2014. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan mengambil konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R